

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH  
DALAM MENGATASI KONFLIK PERANG SUKU  
DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA**

Andreas Aryanto Ate

NPP. 29.1715

*Asdaf Kabupaten Mimika, Provinsi Papua*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [29.1715@praja.ipdn.ac.id](mailto:29.1715@praja.ipdn.ac.id)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Mimika Regency is one of the regions in Indonesia that still has various kinds of problems. One of the problems that has existed and is still happening is tribal wars. The inter-tribal wars that have occurred in Timika Regency in recent years are also inseparable from these main problems. Therefore, local governments need to be active in preventing a tribal war conflict that can cause many people to become victims in a conflict.. **Purpose:** the purpose of this study is to determine the factors that cause tribal war conflicts and to know the local government's strategy in overcoming tribal war conflicts in Mimika Regency. **Method:** In this study using qualitative methods with descriptive writing and deductive approach. The author uses the technique of observation, interviews, and documentation. **Result:** The results that the authors get from this study are the factors of tribal war conflicts, namely suspicion, egoism, value conflicts, ineffective communication and social jealousy. In this case the local government strategy in overcoming the problem of tribal wars is a sociocultural approach, negotiation and mediation. **The Conclusion/suggestion :** The author suggests that the government should not only pay attention to people who are not indigenous Papuans, but also to the indigenous people of Papua. And the Regional Government is more sensitive to problems that arise in the Mimika Regency community considering that the Mimika Regency community is so diverse in ethnicity and culture that later in the conflict resolution process there will be no disappointment over the decisions made

**Keywords :** Strategy, Local Government, Tribal War

1956

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP)** : Kabupaten Mimika merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menyimpan berbagai macam permasalahan dan salah satu masalah yang sampai sekarang telah ada dan masih terjadi adalah perang suku. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu aktif dalam pencegahan suatu konflik perang suku yang dapat menyebabkan banyak warga yang menjadi korban dalam suatu konflik tersebut. **Tujuan** : untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik perang suku dan mengetahui strategi pemerintah daerah dalam mengatasi konflik perang suku di Kabupaten Mimika **Metode** : Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori strategy terhadap penanganan konflik perang suku yang dikemukakan oleh Hunger dan Wheelen. Teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan** : Hasil yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah faktor terjadinya konflik perang suku yaitu sikap kecurigaan, egoisme, konflik nilai, komunikasi yang tidak efektif dan kecemburuan sosial. Dalam hal ini strategi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah perang suku yaitu dengan pendekatan sosiokultural, negosiasi dan mediasi. **Kesimpulan dan saran** : Penulis menyarankan agar pemerintah tidak hanya memberikan perhatian kepada masyarakat yang bukan suku asli Papua, melainkan juga kepada masyarakat asli Papua. Dan Pemerintah Daerah lebih peka terhadap masalah yang timbul di masyarakat Kabupaten Mimika mengingat bahwa masyarakat Kabupaten Mimika begitu beragam suku dan budaya agar nantinya dalam proses penyelesaian konflik tidak akan ada kekecewaan atas keputusan yang dibuat

**Kata Kunci** : Strategi, Pemerintah Daerah, Perang Suku

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Konflik perang suku sudah terjadi sejak zaman nenek moyang dan merupakan tradisi setiap suku di wilayah pegunungan untuk bertahan hidup. Konflik sosial yang terjadi di Papua sangat beragam dan mencakup semua lini kehidupan, mulai dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Konflik sosial yang terjadi di Papua beberapa tahun belakangan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut. Konflik sosial utamanya dipicu oleh perbedaan suku, budaya dan golongan atau kelompok, sesuai dengan karakteristik yang dianggap sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada suku-suku yang ada. Kabupaten Timika merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menyimpan berbagai macam permasalahan. Salah satu masalah yang sampai sekarang telah ada dan masih terjadi adalah perang suku. Perang antarsuku yang terjadi di Kabupaten Timika pada beberapa tahun belakangan ini juga tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut, utamanya adalah perang suku yang dipicu oleh perbedaan suku, budaya dan golongan atau kelompok, sesuai dengan karakteristik dan dianggapnya sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada suku-suku yang ada.

pemerintahan daerah perlu aktif dalam pencegahan suatu konflik perang suku yang dapat menyebabkan banyak warga yang menjadi korban dalam suatu konflik tersebut. Masalah tersebut sering terjadi di distrik Kwamki narma yang menjadi sarang perang suku di distrik tersebut. Perlu ada peran dari pemerintah daerah dalam pencegahan konflik oleh karena itu di dalam pencegahan konflik tersebut memerlukan langkah-langkah pencegahan aktif dari pemerintah. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dituntut untuk tanggap terhadap situasi sosial masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pemerintah Daerah

berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Perang antarsuku yang terjadi di Kabupaten Timika pada beberapa tahun belakangan ini juga tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut, utamanya adalah perang suku yang dipicu oleh perbedaan suku, budaya dan golongan atau kelompok, sesuai dengan karakteristik dan dianggapnya sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada suku-suku yang ada.

Salah satunya terjadi pada tahun 1997 di Tembagapura (wilayah suku Amungme) antara suku Amungme dengan Suku Dani dan Damal yang menjadi Awal dari munculnya perang suku. sebelumnya jarang terjadinya perang suku di kabupaten Mimika. Perang suku tersebut bersamaan dengan pengelolaan dana satu persen (1%) yang bersumber dari PT Freeport Indonesia. Kehadiran Pt Freeport Indonesia itulah semua suku berdatangan di kabupaten Mimika dengan tujuan bekerja dan mencari nafkah di perusahaan tersebut, kemudian saling bertemu dan saling berkenalan antar satu suku dan suku lainnya. Dari sinilah perang antar suku yang muncul dan berkepanjangan.

Pada tahun 2014 terjadinya perang suku antara Suku Dani dan Suku Moni yang terlibat saling serang di Kampung Mimika Gunung, Jayanti, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Kronologi perang suku yang dilakukan oleh suku kerabat yaitu suku Moni dan suku Dani dipicu karena perebutan hak atas tanah. Perang suku pada tahun 2014 berlangsung hingga enam bulan merenggut korban 21 orang. Perang suku berakhir dengan proses “pematahan panah” dan “pembayaran kepala” korban perang sesuai tradisi perang suku yang berlaku. Satu korban dibayar sebesar 500 juta sesuai kesepakatan kepala perang saat itu.<sup>1</sup>

Pada tanggal 19 Februari 2018 terjadi perang suku di distrik Kwamki Narama, kabupaten Mimika. Pada awal pemicunya terjadinya perang adalah aksi saling serang diawali oleh pihak keluarga korban yang merasa tidak puas dan masih menyimpan dendam, sehingga melakukan penyerangan terhadap kelompok yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Tidak hanya melibatkan para pemuda, wanita dan anak-anak terlihat ikut dalam perang suku tersebut. Sementara itu, Kepolisian Resor (Polres) Mimika dan personel TNI yang bertugas di Distrik Kwamki Narama kecewa dengan Pemkab Mimika lantaran sampai saat ini belum turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Akibat perang adat tersebut, para guru Sekolah Dasar (SD) yang tinggal di Distrik Kwamki Narama terpaksa dievakuasi oleh petugas TNI/Polri ke Kota Timika. Petugas hingga saat ini masih melakukan pengamanan untuk mengantisipasi adanya aksi perang susulan antar kelompok tersebut.<sup>2</sup>

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penanganan konflik perang suku di kabupaten mimika.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Yulianus Payzon Aituru mahasiswa Program Studi Magister dari Universitas Gadjah Mada dengan judul “Penyelesaian Konflik Antar Suku dan

---

<sup>1</sup> “Perang Suku Kabupaten Mimika 2014,” <https://www.liputan6.com/news/read/2019696/perang-suku-di-mimika-4-tewas>.

<sup>2</sup> “2 Suku Papua Di Distrik Kwamki Perang Adat Pakai Busur Dan Tombak,” <https://papua.inews.id/berita/2-suku-papua-di-distrik-kwamki-perang-adat-pakai-busur-dan-tombak>.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah” memiliki kesamaan membahas tentang konflik yang ada di Kabupaten Mimika dan perbedaan penelitian tersebut adalah peneliti tersebut menganalisa Human Security dalam Perang antar suku di kabupaten Timika.<sup>3</sup> Kedua, penelitian dilakukan oleh Odi Murib Mahasiswa Universitas Samratulangi dengan judul “Peranan Kepala Suku dalam Penyelesaian Perang Antarsuku di Kabupaten Timika Kajian dari Segi Hukum Adat”. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah Membahas tentang konflik perang suku di mimika. Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah Mengetahui peran kepala suku dalam penyelesaian perang suku di kabupaten mimika kajian dari segi hukum adat.<sup>4</sup> Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Krinus Kum mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Perang Antar Suku Dan Resolusi Konflik Di Kabupaten Mimika Papua”. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah Membahas tentang konflik perang suku di mimika. Perbedaan penelitian tersebut adalah memahami benturan kepentingan antar suku dalam konflik dan juga untuk memahami proses resolusi konflik di Kabupaten Mimika.<sup>5</sup> Keempat, penelitian Wilhelmus Wanmang dari Program Studi Magister Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan judul penelitiannya “Makna Konflik Intergroup dan Perdamaian Pada Suku Amungme” memiliki persamaan yaitu Membahas tentang konflik perang suku di mimika sedangkan perbedaannya yaitu meneliti makna konflik intergroup dan perdamaian bagi suku Amungme.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Konflik Perang Suku di Kabupaten Mimika. Serta dengan informan yang lebih luas sehingga informasi yang didapatkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. GAP penelitian pun hanya ada terjadi pada lokus penulis. Selain itu teori yang digunakan pun berbeda dengan teori yang digunakan penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori strategi dalam mengatasi konflik perang suku di kabupaten mimika yakni teori Hunger dan Wheelen (2003)

#### **1.5 Tujuan**

Untuk mengetahui faktor penyebab konflik perang suku di Kabupaten Mimika Provinsi Papua dan untuk mengetahui strategi pemerintahan daerah dalam mencegah konflik perang suku di Kabupaten Mimika Provinsi Papua

## **II. METODE**

Penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian lapangan atau field research , yakni peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akurat, aktual dan obyektif berdasarkan sumber data primer maupun sumber data sekunder yang didapatkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif desain deskriptif dengan

---

<sup>3</sup> Yulianus Payzon Aituru, “Penyelesaian Konflik Antar Suku Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah ( Analisis Teori Human Security Menurut Dan Henk )” 9 (2019): 106–127.

<sup>4</sup> Murib Odi, “PERANAN KEPALA SUKU DALAM PENYELESAIAN PERANG ANTARSUKU DI KABUPATEN TIMIKA KAJIAN DARI SEGI HUKUM ADAT” III, no. 9 (2015): 63–69.

<sup>5</sup> Krinus Kum, “Perang Antar Suku Dan Resolusi Konflik Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua,” 2013.

pendekatan deduktif<sup>6</sup>. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan<sup>7</sup>. Penelitian ini menggunakan teori strategi yang di kemukakan oleh Hunger dan Wheelen yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi. Adapun yang akan menjadi informan pada penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari : Kakesbangpol, Kepala Ditrik Kwamki Narama, Kepala Kampung Mikorima, dan Masyarakat

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis mengemukakan faktor-faktor terjadinya perang suku dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Konflik Perang Suku di Kabupaten Mimika menggunakan teori strategi dikemukakan oleh Hunger dan Wheelen yang menyatakan bahwa strategi Pemerintah Daerah meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Pengamatan Lingkungan**

Tanah Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menyimpang berbahagai macam permasalahan sosial. Salah satu masalah sosial yang sampai sekarang telah ada dan masih terjadi adalah konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi di Tanah Papua sangat beragam dan mencakup semua ini kehidupan, mulai dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Konflik sosial yang terjadi di Tanah Papua pada beberapa tahun belakang ini 4 juga tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut utamanya adalah konflik sosial yang di picu oleh perbedaan suku, budaya dan golongan atau kelompok, sesuai dengan karakteristik dan dianggapnya sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada suku-suku yang ada.

Masalah persinahan atau perselingkuhan, pembunuhan, kematian tidak wajar, dan rasa dendam yang mendalam merupakan salah satu penyebab perang suku di daerah pedalaman Papua. Di samping itu konflik internal antara suku yang terjadi waktu lampau juga menjadi salah satu factor penyebab perang suku dan kelompok di daerah pedalaman Papua yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik maupun materi lainnya. Konflik sosial yang ada di daerah ini sering di sebut sebagai perang suku atau bahasa dani di sebut wim sedangkan bahasa damal /amungme wem, sebab perang suku yang terjadi adalah antara suku-suku asli Papua yang mendiami daerah tersebut yaitu Suku Dani, Suku Nduga, Suku Delem, Suku Damal/ Amungme, Suku Moni, Suku Wolani, Serta Suku Ekari/ Me, dan Suku-Suku lainnya. Suku-Suku tersebut merupakan Suku - Suku yang mempunyai tradisi perang yang sangat kuat.

Perang adat, dalam masyarakat suku di wilayah pegunungan Papua, tidak semata-mata dilakukan untuk menunjukkan heroisme laki-laki. Di balik kengerian tradisi perang berbalut heroisme laki-laki Papua ini tersimpan petuah leluhur yang tidak boleh diremehkan. Setiap laki-laki di wilayah pegunungan Papua harus mampu melaksanakan petuah leluhur untuk menjaga harga diri, jati diri, tanah leluhur, harta benda, dan sanak keluarga. Hal itu harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Menurut Kepala Kampung Mikorima : “bila ancaman terhadap harga diri dan nilai-nilai leluhur tidak dapat diselesaikan lewat meja perundingan, maka tidak ada pilihan lain, setiap laki-laki harus berani menabuh genderang perang. Perang adat dilakukan untuk menjaga martabat dan memenuhi rasa keadilan.”

---

<sup>6</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali (Medan, Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020).

<sup>7</sup> M.Ali Siyoto, Sandu dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup, vol. 148 (Yogyakarta, 2015).

Selain itu, pembalasan dendam dalam perang adat lazim dimaknai dengan tindakan heroisme untuk mencari keseimbangan sosial yang lebih mirip sebuah kompetisi daripada kerusuhan sosial. Karena itu, ada tuntutan soal jumlah korban yang harus sama di antara kelompok yang bertikai. Soal jumlah korban yang tidak berimbang ini membuat perang adat antara suku Dani dan Damal di Timika di Kwamki Lama sempat berlarut-larut. Upaya perdamaian pun selalu gagal dilakukan. Sebab, adat mewajibkan selama jumlah korban belum berimbang, mereka tetap harus berperang.

### **3.2. Perumusan Strategi**

Manajemen strategi dapat dilihat keberhasilannya jika perumusan strategi dari pemerintah sesuai dengan sosiokultur yang ada di masyarakat. Ketika perumusan strategi yang dibuat oleh pemerintah terlalu ideal untuk dilaksanakan kepada masyarakat, maka akan sulit untuk menjalankan strategi itu dengan baik. Dari Dimensi perumusan strategi melalui aspek yang terkandung didalamnya yaitu bagaimana misi pemerintah dalam mengatasi konflik di kabupaten Mimika, kemudian apa tujuan pemerintah daerah sesuai dengan misi yang dibuat serta bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi konflik perang suku tersebut dan kebijakan pertama apa yang dikeluarkan pemerintah daerah pada saat terjadi konflik tersebut. Dalam perumusan strategi diketahui terdapat suatu misi. dalam hal ini misi dari pemerintah kabupaten Mimika belum dibuat secara sistematis, walaupun demikian Pemerintah Daerah maupun forum/lembaga penanganan konflik yang bertanggung jawab dalam penanganan dan penyelesaian konflik yang terjadi memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Sosial. Maksud dari penyelesaian konflik yang ada di kabupaten Mimika ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian sistematis dan terencana dalam peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian, dan pemulihan pasca konflik.

Dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari memang biasanya masyarakat Distrik Kwamki Narama cenderung berakhir dengan adanya perang suku, namun selama ini penanganan perang suku yang sudah terjadi dan dilakukan secara adat terbukti tidak mampu mengatasi perang suku secara permanen. Penanganan yang hanya mengedepankan persoalan cultural itu justru semakin mengukuhkan penyebab utama konflik, yaitu kategorisasi sosial.

Sebuah persyaratan penting meredam atau menghentikan konflik sosial adalah mentransformasikan dirinya menjadi kerusuhan sosial yang ditandai oleh menonjolnya kontak fisik/perang antar suku yang saling menghancurkan di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika tersebut, itulah aturan main yang adil dan adanya tindakan Pemerintah Daerah yang dapat bertindak adil dan bertindak sebagai pengayom masyarakat. Bila tidak ada tindakan dari Pemerintah Daerah yang bertindak adil dan mengayomi serta melayani masyarakat, maka konflik fisik/ perang antar suku tersebut tidak dapat dicegah. Oleh karena itu sebagai Pelayan Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tentunya harus berupaya di dalam mencegah perang antar suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika dimaksud.

### **3.3. Implementasi Strategi**

Berdasarkan Buku Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik di Kabupaten Mimika Provinsi Papua ada beberapa program yang mendukung suatu strategi tersebut meliputi: Pertama, pendekatan sosiokultural yang dimana Pendekatan sosiokultural dilakukan karena sifatnya yang mengakomodir kepentingan kultur daerah setempat dan lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat. penyelenggaraan hukum adat baik dalam hal penerapan peradilan maupun penyelidikannya dengan melukiskannya (menyesuaikannya)

daerah demi daerah. Papua merupakan salah satu daerah yang masih menerapkan hukum adat. Peran kepala suku masih cukup dominan dalam mengatur kehidupan di masing-masing suku daerah sehingga ikut mempengaruhi situasi di Papua. Dalam penyelesaian konflik, penyelesaian secara adat ini dikedepankan. Namun dalam perkembangannya apabila tidak tercapai kesepakatan atau konsensus dari para pihak yang berkonflik maka hukum positif yang akan diterapkan, dalam hal ini pihak kepolisian mengambil kendali penyelesaian masalah. Secara teori, penerapan pendekatan sosiokultural atau kognitif sosial menekankan bagaimana hukum menyertakan kebudayaan ke dalam penalaran, interaksi sosial, dan pemahaman diri mereka dalam menyelesaikan masalah.

Kedua, Negosiasi merupakan mekanisme yang utama dan prioritas dalam penyelesaian kasus konflik antar suku di wilayah Kabupaten Mimika. Dengan negosiasi tersebut, dapat dicari solusi terhadap permasalahan konflik yang terjadi. Sesuai dengan hakekat Pemerintah itu sendiri, yaitu mencari penyelesaian terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Adapun negosiasi dapat dilakukan dalam dua cara, pertama, negosiasi dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan ujung tombaknya adalah TNI/POLRI. Kedua, negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama TNI/POLRI dalam Mencegah Perang Suku di Distrik Kwamki Narama Mimika dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang membahas untuk mencari penyelesaian konflik yang terjadi.

Ketiga, mediasi suatu proses penyelesaian konflik atau masalah dengan melibatkan orang atau pihak ketiga. Agar terciptanya kondisi yang kondusif, maka Pemerintah Kabupaten Mimika memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi, atau menjadi mediasi untuk kedua suku yang berkonflik. Langkah-langkah mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, yaitu dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, sehingga dapat melakukan negosiasi yang dihadari oleh para tokoh masyarakat, Pemerintah daerah, Satuan Binmas Polres Mimika dan petugas Polmas, Danramil bahkan pihak kejaksaan dan pengadilan. Dengan adanya pertemuan untuk melakukan negosiasi tersebut, mendapat pemecahan masalah yang saling menguntungkan kedua belah pihak

### **3.4. Evaluasi**

Poin terakhir ialah evaluasi terkait dengan penyelesaian konflik perang suku yang terjadi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menganggap bahwa semenjak sudah tidak terjadinya suatu konflik program dari pemerintah mulai kurangnya pembinaan yang dilakukan pemerintah ke masyarakat dapat menimbulkan kembali konflik yang terjadi di masyarakat, meskipun dalam skala terkecil hal ini disebabkan karena konflik yang terjadi di masyarakat tidak hanya tentang suku atau agama namun juga tentang isu ekonomi yang terjadi di masyarakat tersebut, berikut kutipan wawancara : menurut saya pembinaan berkelanjutan berkurang, ada juga isu ekonomi juga waktu itu, nah pemerintah kurang memperhatikan sampai sekarang. Keamanan juga kurang, jadi tindak lanjut penyebab konflik itu belum diselesaikan.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Tanah Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menyimpang berbahagai macam permasalahan sosial. Salah satu masalah sosial yang sampai sekarang telah ada dan masih terjadi adalah konflik sosial. Masalah persinahan atau perselingkuhan, pembunuhan, kematian tidak wajar, dan rasa dendam yang mendalam merupakan salah satu penyebab perang suku di daerah pedalaman Papua. Hal ini serupa dengan penelitian Odi Morib (2015) dia menganalisis data yang telah dikumpulkan. Perang antar suku di Mimika merupakan suatu persaingan ketat antara suku, dimana suku yang satu ingin mendominasi suku yang lain

terutama dalam hal kekuatan suku. Atau dalam peperangan ada suku yang kuat dan suku yang lemah, pertarungannya lebih kuat karena suku yang kuat ingin mendominasi suku yang lemah dan suku yang lemah ingin sama dengan suku yang kuat, sehingga nilai-nilai adat-istiadat seperti ini terus menguat. Terjadinya setiap perang antar suku berkepanjangan di Kabupaten Mimika, tidak hanya terfokus pada satu masalah melainkan berbagai macam masalah antara lain; dana satu persen (1%), perebutan lahan/hak ulayat tanah, harta wanita dan perselingkuhan, kecemburuan sosial, dendaman, kekuasaan politik posisi atau jabatan, minuman keras, pendulangan tradisional, dan lain sebagainya. Perang antar suku di Mimika juga di dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan pribadi dan golongan. Di sisi lain, aparat keamanan juga ada keterlibatan dalam perang antar suku di Mimika.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Mimika sering terjadinya suatu permasalahan terkhususnya perang suku. Sejak tahun 1997 itulah Kabupaten Mimika diperkenalkan perang antar suku atau perang adat, akan tetapi sebelumnya sejak nenek moyang hingga tahun 1990-an belum pernah terdengar terjadi perang antar suku, namun yang ada adalah perang antar keluarga atau perang antar klan dari satu suku. Nama perang-perang antar klan yang terkenal di wilayah Amungsa antara lain adalah Woem Talang, Woem Tanat, Woem Tsingogong Narewal, Woem Kelawodigal, Hoya Woem dan lain sebagainya. Nama-nama perang tersebut di atas yang terjadi di wilayah Amungsa merupakan perang antar klan atau perang antar keluarga. Perang tersebut masa perang biasanya lama dan menghabiskan banyak korban nyawa, lalu penyelesaiannya pun sangat cepat dan mudah diselesaikan melalui hukum adat setempat. Sesuai dengan penelitian Krinus Kim (2013) Masalah perang antar suku di Provinsi Papua kerap kali terjadi, terutama di Pegunungan Tengah Papua dan khususnya di Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika hampir setiap pekan terjadi perang antar suku dengan berbagai macam permasalahan di antaranya adalah masalah tanah atau hak ulayat, masalah harta wanita, masalah jabatan atau posisi, masalah pemilihan kepala daerah, kecemburuan sosial, dendaman dan lain-lain

Oleh karena itu, pemerintahan daerah perlu aktif dalam pencegahan suatu konflik perang suku yang dapat menyebabkan banyak warga yang menjadi korban dalam suatu konflik tersebut. Masalah tersebut sering terjadi di distrik Temus Kwamki narma yang menjadi sarang perang suku di distrik tersebut. Perlu ada peran dari pemerintah daerah dalam pencegahan konflik oleh karena itu di dalam pencegahan konflik tersebut memerlukan langkah-langkah pencegahan aktif dari pemerintah. Seperti halnya dalam penelitian Yulianus Payzon Aituru (2009) Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dapat berfungsi menjalankan peranan pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Mimika baik peranan di bidang keamanan dan keselamatan (security and safety) maupun peranan dalam bidang kesejahteraan dan kemakmuran (welfare and prosperity). Peran pemerintah yang lemah, berpengaruh pada pelayanan pemerintah yang dimungkinkan tidak terwujudnya kepuasan rakyat. Prosesnya dilihat pada situasi konflik di Kabupaten Mimika, pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan aparat Kepolisian setempat berupaya menghentikan pertikaian ini

### **3.6 Diskusi Temuan Penelitian Lainnya**

Penulis menemukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu perang suku di Kabupaten Mimika Provinsi Papua yaitu sikap kecurigaan, sikap egoism, konflik nilai, komunikasi yang kurang efektif, dan kecemburuan sosial.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Strategi Pemerintahan Dalam Mengatasi Konflik Perang Suku di Kabupaten Mimika Provinsi Papua dalam teori hunger dan wheelen meliputi :

Pengamatan lingkungan yang terdiri dari Konflik sosial yang ada di daerah ini sering di sebut sebagai perang suku atau bahasa dani di sebut wim sedangkan bahasa damal /amungme wem, sebab perang suku yang terjadi adalah antara suku-suku asli Papua yang mendiami daerah tersebut yaitu Suku Dani, Suku Nduga, Suku Delem, Suku Damal/ Amungme, Suku Moni, Suku Wolani, Serta Suku Ekari/ Me, dan Suku-Suku lainnya.

perumusan strategi bagaimana misi pemerintah dalam mengatasi konflik dikabupaten Mimika, kemudian apa tujuan pemerintah daerah sesuai dengan misi yang dibuat serta bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi konflik perang suku tersebut dan kebijakan pertama apa yang dikeluarkan pemerintah daerah pada saat terjadi konflik tersebut Maksud dari penyelesaian konflik yang ada di kabupaten Mimika ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian sistematis dan terencana dalam peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian, dan pemulihan pasca konflik.

Dalam implementasi strategi terdapat beberapa program dari pemerintah yaitu pendekatan sosiokultural, negosiasi dan mediasi. dalam hal ini anggaran sebagai pokok utama dalam mendukung program tersebut. Anggaran tersebut berupa dana perbaikan dan renovasi kerusakan rumah warga dan anggaran perdamaian. Dan dalam mendukung program tersebut perlu ada langkah-langkah dari pemerintah daerah sehingga program-program tersebut dapat berjalan dengan baik

Dalam evaluasi adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah sangat ketat dalam hal Ini pemerintah mulai memfokuskan untuk menjaga situasi dan kondisi di Distrik Kwamki Narama. pemerintah bersama aparat keamanan melakukan pengawassan dengna membuat pos-pos di setiap kampung sehingga dapat menjaga ketertiban dan keamanan suatu daerah. Namun semenjak sudah tidak terjadinya suatu konflik program dari pemerintah mulai kurangnya pembinaan yang dilakukan pemerintah ke masyarakat dapat menimbulkan kembali konflik yang terjadi dimasyarakat, meskipun dalam skala terkecil hal ini disebabkan karena konflik yang terjadi di masyarakat tidak hanya tentang suku atau agama namun juga tentang isu ekonomi yang terjadi dimasyarakat tersebut. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu wilayah saja yang digunakan sebagai lokasi penelitian dari penulis.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak hanya memberikan perhatian kepada masyarakat yang bukan suku asli, melainkan juga kepada masyarakat asli papua, perhatian aja tidak dengan dana saja melainkan juga dengan cara lain misalnya pembangunan jalan, dan penyerapan tenaga kerja yang merata dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika lebih peka terhadap masalah yang timbul di masyarakat Kabupaten Mimika mengingat bahwa masyarakat Kabupaten Mimika begitu beragam suku dan budaya agar nantinya dalam proses penyelesaian konflik tidak akan ada kekecewaan atas keputusan yang dibuat

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Walinagari Sungai Kesbangpol, dan Distrik Kwamki Narama beserta jajarannya, para Masyarakat Kwamki Narama yang telah membantu banyak dalam pelaksanaan penlitian terutama dalam memberikan informasi sehingga membantu dalam menyelesaikan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Aituru, Yulianus Payzon. "Penyelesaian Konflik Antar Suku Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah ( Analisis Teori Human Security Menurut Dan Henk )" 9 (2019): 106–127.

Fahma, Aisyah Rahmaini. "Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran." *New England Journal of Medicine*, 2018.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. Medan, Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.

Kum, Krinus. "Perang Antar Suku Dan Resolusi Konflik Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua," 2013.

Odi, Murib. "PERANAN KEPALA SUKU DALAM PENYELESAIAN PERANG ANTARSUKU DI KABUPATEN TIMIKA KAJIAN DARI SEGI HUKUM ADAT" III, no. 9 (2015): 63–69.

Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayup. Vol. 148. Yogyakarta, 2015.

"2 Suku Papua Di Distrik Kwamki Perang Adat Pakai Busur Dan Tombak." <https://papua.inews.id/berita/2-suku-papua-di-distrik-kwamki-perang-adat-pakai-busur-dan-tombak>.

"Perang Suku Kabupaten Mimika 2014." <https://www.liputan6.com/news/read/2019696/perang-suku-di-mimika-4-tewas>.

